

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| DAFTAR ISI | i-ii |
| I PENJELASAN UMUM | 1 |
| A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA | 1 |
| B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA | 1 |
| C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA | 2 |
| D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR CINDE WILIS | 2 |
| E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA | 2 |
| II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA | 3 |
| A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA | 3 |
| 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | 3 |
| 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris | 4 |
| 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada) | 5 |
| B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI | 6 |
| 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR | 6 |
| 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain | 7 |
| C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR | 7 |
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR | 7 |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR | 7 |
| D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | 8 |
| 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR | 8 |
| 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain | 8 |
| E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR | 8 |
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR | 8 |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR | 9 |
| F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS | 9 |
| 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS | 9 |
| 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS | 9 |

| | |
|--|----|
| G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH | 10 |
| H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS | 10 |
| 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun | 10 |
| 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris | 11 |
| I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) | 11 |
| J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI | 11 |
| K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN | 12 |
| L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN | 12 |
| M. PENUTUP | 13 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan Publikasi PT. BPR Cinde Wilis posisi 31 Desember 2023 dapat diinformasikan bahwa total aset BPR adalah Rp 607.552.770.240, sedangkan modal inti BPR adalah Rp 40.210.801.266. Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan *corporate governance*, PT. BPR Cinde Wilis mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *corporate governance* sebagai berikut:

- a. UU No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. UU No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. POJK No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. POJK No.19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Persekonomian Rakyat Dan Bank Persekonomian Rakyat Syariah.
- g. POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- h. POJK No.8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- i. POJK No.23/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- j. POJK No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- k. POJK No.14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- n. SEOJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- o. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. SEOJK No.11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Persekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Persekonomian Rakyat Syariah.
- q. SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.

- r. Anggaran dasar PT. BPR Cinde Wilis beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR CINDE WILIS

1. **Transparency (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. **Accountability (Akuntabilitas)**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.

3. **Responsibility (Pertanggungjawaban)**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. **Independency (Independensi)**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. **Fairness (Kewajaran)**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Cinde Wilis juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Cinde Wilis sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |
|-----|---|
| 1. | Nama : Lucia Primastuti Rahayu, SE |
| | NIK : 3509114402740002 |
| | Jabatan : Direktur Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional harian Kantor Pusat, yaitu dengan menjalankan fungsi koordinasi antara Direktur Utama dengan seluruh Direktur dan fungsi pengawasan/pengendalian, fungsi pengarahan, fungsi koordinasi, fungsi konsultasi dan fungsi kolegial terhadap seluruh Biro di Kantor Pusat. |
| 2. | Nama : Bibin Hendra Nusarofa, SE |
| | NIK : 3509202811740002 |
| | Jabatan : Direktur Kredit Komersial |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan aspek perkreditan oleh Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka penyaluran dan monitoring kredit agar dihasilkan kualitas kredit yang sehat dan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran kredit. Melakukan survei pengajuan kredit sampai dengan BMPK perseroan. |
| 3. | Nama : Firman Ardiansyah, SE |
| | NIK : 3511112112790006 |
| | Jabatan : Direktur Kredit Retail |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan aspek perkreditan oleh Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka penyaluran dan monitoring kredit agar dihasilkan kualitas kredit yang sehat dan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran kredit. Melakukan survei pengajuan kredit ≤ Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah). |
| 4. | Nama : Anang Erfantoro, A.Md |
| | NIK : 3509191909670003 |
| | Jabatan : Direktur Pemasaran |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran Kredit dan Simpanan bersama Biro Pemasaran untuk mencapai target |

| | |
|----|--|
| | penjualan dan mengembangkan strategi pemasaran secara efektif dan efisien. |
| 5. | Nama : Sunarwati, SE |
| | NIK : 3509195511700007 |
| | Jabatan : Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan operasional Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank serta peraturan-peraturan pemerintah dan OJK. |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi diharapkan dapat mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2. Direksi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3. Direksi wajib terus menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
4. Direksi harus tetap melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan *digital banking* dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
5. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat *human error* agar di evaluasi dan di mitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.
7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |
|-----|--|
| 1. | Nama : Paulino Krisnawahjuesa, MBA |
| | NIK : 3578092811740001 |
| | Jabatan : Komisaris Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian. |
| 2. | Nama : Yudinata Tjipto Santoso, SE |
| | NIK : 3509200305750002 |
| | Jabatan : Komisaris |

| | |
|---|--|
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian. |
| 3. | Nama : Haudinata Tjipto Santoso, ST |
| | NIK : 3578212208720001 |
| | Jabatan : Komisaris |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian. |
| 4. | Nama : Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc |
| | NIK : 3509211103490001 |
| | Jabatan : Komisaris |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian. |
| Rekomendasi kepada Direksi: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Direksi mengupayakan terus menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan memperbaiki tingkat kesehatan nominatif BPR. 2. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan <i>digital banking</i> dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan dapat dipercaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pembinaan dan pelatihan yang tepat. 4. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 5. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat <i>human error</i> agar di evaluasi dan di mitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. 6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi. 7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis. | |

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|-----|---------------------------------|
| 1. | Komite Audit |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| 2. | Komite Pemantau Risiko |

| | |
|----|--------------------------------|
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No. | Nama | NIK | Keahlian | Komite | | | Pihak Independen (Ya/Tidak) |
|------|------|-----|----------|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | |
| 1. | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | |

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|-----|--|
| 1. | Komite Audit |
| | Program Kerja : |
| | Realisasi : |
| | Jumlah Rapat : |
| 2. | Komite Pemantau Risiko |
| | Program Kerja : |
| | Realisasi : |
| | Jumlah Rapat : |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Program Kerja : |
| | Realisasi : |
| | Jumlah Rapat : |

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. | Lucia Primastuti Rahayu, SE | 3509114402740002 | 0 | 0 |
| 2. | Bibin Hendra Nusarofa, SE | 3509202811740002 | 0 | 0 |
| 3. | Firman Ardiansyah, SE | 3511112112790006 | 0 | 0 |
| 4. | Anang Erfantoro, A.Md | 3509191909670003 | 0 | 0 |
| 5. | Sunarwati, SE | 3509195511700007 | 0 | 0 |

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|----------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | NIHIL | | | | |

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|-----|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Lucia Primastuti Rahayu, SE | 3509114402740002 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Bibin Hendra Nusarofa, SE | 3509202811740002 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 3. | Firman Ardiansyah, SE | 3511112112790006 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 4. | Anang Erfantoro, A.Md | 3509191909670003 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 5. | Sunarwati, SE | 3509195511700007 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK | Hubungan Keluarga | | |
|-----|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Lucia Primastuti Rahayu, SE | 3509114402740002 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Bibin Hendra Nusarofa, SE | 3509202811740002 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 3. | Firman Ardiansyah, SE | 3511112112790006 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 4. | Anang Erfantoro, A.Md | 3509191909670003 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 5. | Sunarwati, SE | 3509195511700007 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. | Paulino Krisnawahjuesa, MBA | 3578092811740001 | 3.390.000.000 | 30,00 |
| 2. | Yudinata Tjipto Santoso, SE | 3509200305750002 | 2.825.000.000 | 25,00 |
| 3. | Haudinata Tjipto Santoso, ST | 3578212208720001 | 2.825.000.000 | 25,00 |
| 4. | Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc | 3509211103490001 | 0 | 0 |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|------------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | NIHIL | | | | |

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|---|-----------------|---|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Paulino Krisnawahjuesa, MBA | 3578092811740001 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Yudinata Tjipto Santoso, SE | 3509200305750002 | Haudinata Tjipto Santoso, ST-Ada hubungan | Tidak ada | Haudinata Tjipto Santoso, ST-Ada hubungan |
| 3. | Haudinata Tjipto Santoso, ST | 3578212208720001 | Yudinata Tjipto Santoso, SE-Ada hubungan | Tidak ada | Yudinata Tjipto Santoso, SE-Ada hubungan |
| 4. | Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc | 3509211103490001 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keluarga | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|--|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Paulino Krisnawahjuesa, MBA | 3578092811740001 | Tidak ada | Tidak ada | Oferi Kresnawahjuesa, M.Sc,Ph.D-Saudara Kandung, Vinolia-Orang Tua Kandung |
| 2. | Yudinata Tjipto Santoso, SE | 3509200305750002 | Haudinata Tjipto Santoso, ST-Saudara Kandung | Tidak ada | Haudinata Tjipto Santoso, ST-Saudara Kandung |
| 3. | Haudinata Tjipto Santoso, ST | 3578212208720001 | Yudinata Tjipto Santoso, SE-Saudara Kandung | Tidak ada | Yudinata Tjipto Santoso, SE-Saudara Kandung |
| 4. | Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc | 3509211103490001 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji | 5 | 133.942.296 | 4 | 135.100.000 |
| 2. | Tunjangan | - | - | - | - |
| 3. | Tantiem | - | - | - | - |
| 4. | Kompensasi berbasis saham | - | - | - | - |
| 5. | Remunerasi Lainnya | 5 | 610.849.037 | 4 | 1.975.926.548 |
| Total | | | 744.791.333 | | 2.111.026.548 |

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|-----|--------------------------------------|--|-----------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1. | Perumahan | - | - |
| 2. | Transportasi | - | - |
| 3. | Asuransi Kesehatan | - | - |
| 4. | Fasilitas lainnya | - | - |

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

| Keterangan | Perbandingan | | |
|--|--------------|---|---|
| | (a/b) | : | 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 7,89 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,58 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,01 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 1,01 | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 2,03 | : | 1 |

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|-----|-------------------|----------------|---|
| 1. | 25 Januari 2023 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebijakan pemberian deviasi keputusan kredit. 2. Kepatuhan pelaksanaan POJK No. 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR. 3. Pentingnya peningkatan / pertumbuhan Database Customer Kredit. |
| 2. | 1 Februari 2023 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait data kredit Hapus Buku (PH). 2. Kriteria kredit Hapus Buku (PH) yang akan diajukan sebagai kredit Hapus Tagih. 3. Pemberian target penyelesaian kredit Hapus Tagih. 4. Pemberian apresiasi pencapaian NOA terbanyak tiap bulan. |
| 3. | 28 Maret 2023 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana digitalisasi BPR. 2. Rencana Linkage dengan Bank Umum. 3. Peninjauan kembali ketentuan tentang Reward AO/AO Leader dengan kondisi saat ini. |
| 4. | 11 April 2023 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan service kepada Nasabah BPR. 2. Evaluasi kegiatan promosi produk BPR. 3. Evaluasi kegiatan penggalan dana. |
| 5. | 1 Agustus 2023 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembukaan Jaringan Kantor Baru. 2. Dengan Biro SDM terkait proses rekrutmen SDM. 3. Dengan Biro TI terkait rencana digitalisasi BPR. |
| 6. | 19 September 2023 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Digitalisasi BPR. 2. Rencana pemenuhan modal dengan penarikan Deviden. 3. Rencana Linkage dengan Bank Umum. |
| 7. | 1 November 2023 | 4 | Rencana Bisnis BPR: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghimpunan Dana. 2. Penyaluran Dana. 3. <i>Prudential Banking</i> dan <i>Risk Management</i>. 4. Efisiensi biaya. 5. Arah kebijakan BPR. |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | Paulino Krisnawahjuesa, MBA | 3578092811740001 | 7 | 0 | 100,00 |
| 2. | Yudinata Tjipto Santoso, SE | 3509200305750002 | 7 | 0 | 100,00 |
| 3. | Haudinata Tjipto Santoso, ST | 3578212208720001 | 7 | 0 | 100,00 |
| 4. | Paul Alim Gunawan Kristanto, B.Sc | 3509211103490001 | 7 | 0 | 100,00 |

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Telah Diselesaikan | | - | | - | | 2 | | 3 |
| Dalam Proses Penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Belum Diupayakan Penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | - | | - | | - | | - |

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|---|-----------------|----------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 26 | - |
| Dalam Proses Penyelesaian | 2 | 1 |
| Total | 28 | 1 |

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Pengambil Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|---------|-----|---------------------|---------|-----|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | NIK | | | |
| 1. | NIHIL | | | | | | | | |

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SELAMA PERIODE PELAPORAN

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|---------------------------------|--|--|-------------|
| 1. | 10 - 18 April 2023 | Sosial | Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di seluruh kantor Cabang BPR Wilis. | Masyarakat kurang mampu di sekitar Kantor BPR Wilis. | 50.657.827 |
| 2. | 6 Desember 2023 | Sosial | Dalam rangka menyambut hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Ambulu. | Panti Jompo Bakti Luhur di Desa Kesilir dan Panti Asuhan Bintang Sembilan di Desa Wuluhan. | 5.719.213 |
| 3. | 7 Desember 2023 | Sosial | Dalam rangka menyambut hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor Pusat Operasional Jember. | Panti Hermanas Carmelitas (yayasan, panti asuhan,dll) di Jember | 4.967.215 |
| 4. | 11 Desember 2023 | Sosial | Dalam rangka menyambut hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Banyuwangi. | Panti Asuhan Clara Fey di Gereja Maria Ratu Para Rasul Curahjati Purwoharjo Banyuwangi | 5.491.213 |
| 5. | 12 Desember 2023 | Sosial | Dalam rangka menyambut hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Bondowoso. | Panti Jompo Tresna Werdha di Blindungan Bondowoso | 5.859.213 |

| | | | | | |
|----|------------------------|--------|--|---|-----------|
| 6. | 14 Desember 2023 | Sosial | Dalam rangka menyambut hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Probolinggo. | Asrama Susteran Santa Perawan Maria Magnificat di Probolinggo | 5.279.713 |
| 7. | 19 Desember 2023 | Sosial | Dalam rangka menyambut hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Lumajang. | Panti Asuhan Regina Pacis di Lumajang | 5.111.213 |

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis. Melalui laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan *stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan laporan ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis.

Jember, 29 Januari 2024
Persetujuan Pengurus PT. BPR Cinde Wilis



Paulino Krisnawahjuesa, MBA
Komisaris Utama



Lucia Primastuti Rahayu, SE
Direktur Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Cinde Wilis

Posisi : Tahun 2023

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola | |
|---|--------------------|
| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
| 1,7 | Sangat Baik |
| Analisis | |
| <p>PT. BPR Cinde Wilis telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Cinde Wilis.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. | |

Jember, 29 Januari 2024

Persetujuan Pengurus PT. BPR Cinde Wilis



Paulino Krisnawahjuesa, MBA
Komisaris Utama



Lucia Primastuti Rahayu, SE
Direktur Utama

LAMPIRAN

TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR CINDE WILIS
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|--------------------|
| | | Struktur (S) | Proses (P) | Hasil (H) | S+P+H | Nilai Bobot Faktor |
| 1 | Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%) | 0,59 | 0,65 | 0,18 | 1,42 | 0,284 |
| 2 | Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%) | 0,89 | 0,75 | 0,20 | 1,84 | 0,276 |
| 3 | Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%) | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0,200 |
| 5 | Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%) | 0,90 | 0,80 | 0,20 | 1,90 | 0,190 |
| 6 | Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%) | 0,80 | 0,50 | 0,20 | 1,50 | 0,150 |
| 7 | Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%) | 1,00 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0,038 |
| 8 | Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%) | 1,00 | 0,86 | 0,20 | 2,06 | 0,206 |
| 9 | Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%) | 1,00 | 0,80 | 0,10 | 1,90 | 0,142 |
| 10 | Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%) | 1,00 | 0,80 | 0,10 | 1,90 | 0,142 |
| 11 | Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%) | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 1,30 | 0,098 |
| NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | | | | | | 1,7 |

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT |
|-----------------------------|--------------------|
| 1,0 <= Nilai Komposit < 1,8 | Sangat Baik |
| 1,8 <= Nilai komposit < 2,6 | Baik |
| 2,6 <= Nilai Komposit < 3,4 | Cukup Baik |
| 3,4 <= Nilai Komposit < 4,2 | Kurang Baik |
| 4,2 <= Nilai Komposit < 5,0 | Tidak Baik |

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sangat Baik

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|--------------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan) | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6 | | 1,17 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,59 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 2 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 3 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 4 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----|---|---|---|---|
| 5 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 6 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.24/SEOJK.03/2020. |
| 7 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian | | X | | | | Telah sesuai POJK No.62/POJK.03/2020. |
| 8 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 13 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 1,63 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,65 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS | X | | | | | Telah sesuai POJK No.62/POJK.03/2020. |
| 2 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 3 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 4 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 5 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 9 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5 | | 1,80 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,18 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,42 |
| TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,284 |



KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|--------------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi | | | | X | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 16 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9 | | 1,78 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,89 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 2 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 3 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan | | X | | | | Telah sesuai POJK |

| | | | | | | | |
|--|---|------|----|---|---|---|--------------------------------------|
| | operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan | | | | | | No.4/POJK.03/2015. |
| 4 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 5 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris | X | | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 6 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 7 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 8 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 15 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 1,88 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,75 | | | | | |
| C | | | | | | | |
| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,84 |
| TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,276 |

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern | | | | | | |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko | | | | | | |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,00 | | | | | |
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,00 | | | | | |



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 0,00 |
| TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,000 |

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|--------------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,00 |
| TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,200 |

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|----|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 3 | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan | | | X | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 9 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 1,80 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,90 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| 5 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |



| | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|--|--|
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 10 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan | | X | | | Telah sesuai SEOJK No.1/SEOJK.03/2019. | |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris | | X | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. | |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | Telah sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2016. | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 6 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |
| PENJUMLAHAN S+P+H | | | | | | 1,90 | |
| TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | | | | | | 0,190 | |

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 2 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 3 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016 |
| 4 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern | | X | | | | Telah sesuai POJK No.4/POJK.03/2015 dan POJK No.19 tahun 2023 serta SEOJK No.6/SEOJK.03/2016, BPR tidak memiliki program rekrutmen PE Audit Intern, namun penunjukan PE Audit Intern telah melalui assessment dan persetujuan dari Direktur Utama serta telah mendapatkan saran dan rekom dari Komisaris. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 1,60 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,80 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 2 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 3 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 4 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern | X | | | | | Telah sesuai POJK No.19 tahun 2023 dan SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---|
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 5 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 1,25 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,50 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan | | X | | | | Telah sesuai POJK No.75/POJK.03/2016, semua POJK yang berkaitan mengenai audit intern dan SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 2 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Telah sesuai POJK No.75/POJK.03/2016, semua POJK yang berkaitan mengenai audit intern dan SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 3 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Telah sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016. |
| 4 | BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | Pengangkatan PE audit intern SK Direksi No.219/II/SK/KP.DIR-00/2019 tanggal 31 Juli 2019. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,50 |
| TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,150 |

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud | | X | | | | Surat Perjanjian Kerja Audit Laporan Keuangan antara BPR Wilis dan KAP Soebandi dan Rekan No.12/SBD-SPK/X/2023 dan surat Penunjukan KAP berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 6 Oktober 2023. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris | X | | | | | Keputusan RUPSLB tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan AP Soebandi dan KAP Soebandi & Rekan serta usulan Dewan Komisaris tgl 26 September 2023. |
| 2 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.36/SEOJK.03/2017. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,40 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.36/SEOJK.03/2017. |
| 2 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Telah sesuai SEOJK No.36/SEOJK.03/2017. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN | | 1,00 | | | | | |



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

| | | |
|--|------|--|
| (H): 2 | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | 0,10 | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,50 |
| TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,038 |

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko | | X | | | | SK Direksi No.194/X/SK/KP.DIR00/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai POJK No.13/POJK.03/2015 dan POJK No.4/POJK.03/2015. |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko | | X | | | | Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko No.114a/VI/SK/KP.DIR-00/2019 tanggal 14 Juni 2019 sesuai POJK No.13/POJK.03/2015. |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan | | X | | | | Belum memiliki kebijakan namun setiap akan menerbitkan produk atau aktivitas baru selalu disertai dengan SK Direksi. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 6 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi | | X | | | | Telah memiliki namun masih memerlukan penyempurnaan. |
| 2 | Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris | | X | | | | Telah memiliki namun masih memerlukan penyempurnaan. |
| 3 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material | | | X | | | Sudah melakukan namun masih perlu perbaikan. |
| 4 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh | | X | | | | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh, hal ini telah dibuktikan dengan pemenuhan struktur dan infrastruktur Manajemen Risiko yaitu penunjukkan PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan (SK Direksi |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----|---|---|---|---|
| | | | | | | | No.194/X/SK/KP.DIR-00/2018), pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko (SK No.114a/VI/SK/KP.DIR-00/2019). |
| 5 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Sudah menerapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. |
| 6 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh | | X | | | | Sudah menggunakan aplikasi yang mendukung penerapan manajemen risiko. |
| 7 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko | | X | | | | Sudah dilakukan namun harus tetap terus diingatkan. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 15 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7 | | 2,14 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,86 | | | | | |
| C | | | | | | | |
| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. |
| 2 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Untuk laporan produk dan aktivitas baru dilaporkan sesuai dengan ketentuan. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,06 |
| TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,206 |

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR | | X | | | | Kebijakan dan Prosedur BMPK masih terpisah dan kebijakan kredit masih akan disempurnakan. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Pengkinian akan disesuaikan mengikuti ketentuan yang berlaku. |
| 2 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan | | X | | | | Seluruh proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Telah sesuai dengan ketentuan dan sudah dilaporkan BMPK pada Labul setiap bulannya. |
| 2 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran maupun pelanggaran BMPK. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,10 | | | | | |



PT. BPR CINDE WILIS

Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada

No. 187 Kav. A 17-18

Jember

Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,90 |
| TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,142 |

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR | | X | | | | Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai POJK No.15/POJK.03/2021. |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | RBB sudah menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | X | | | | BPR tidak melakukan penambahan modal disetor karena telah sesuai ketentuan. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 6 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko | | X | | | | Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal untuk menjaga kelangsungan usaha BPR. |
| 2 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR | | X | | | | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB, hal ini dibuktikan dengan penyusunan Laporan Pengawasan Dekom yang telah dilaporkan pada bulan Januari 2024. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |



PT. BPR CINDE WILIS
Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada
No. 187 Kav. A 17-18
 Jember
 Telp. 0331 411999, Fax. 0331 425333

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| C | | | | | | | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | x | | | | | | | | | | RBB telah disusun dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | | | | | | 1 | | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | | | | | | 0,10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| PENJUMLAHAN S+P+H | | | | | | | 1,90 | | | | |
| TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | | | | | | | 0,142 | | | | |

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR CINDE WILIS
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | X | | | | | CBS BPR telah memadai dan menghasilkan laporan yang lengkap, utuh dan akurat. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 1 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,50 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Laporan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK. |
| 2 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Opini dari KAP tahun 2022 tanggal 28 Februari 2023, Laporan Tahunan posisi tahun 2022 yang dilaporkan tahun 2023 tanggal 18 April 2023. |
| 3 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | BPR telah melaksanakan transparansi informasi produk sesuai ketentuan OJK melalui web dan IG. |
| 4 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Laporan sudah disusun dan disajikan sesuai dengan tata cara dan ketentuan OJK. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 1,75 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,70 | | | | | |
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai | X | | | | | Sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK. |



| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|--|
| | ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | | | | | |
| 2 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | X | | | | | BPR telah menyampaikan laporan pengaduan secara tepat waktu. |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,10 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,30 |
| TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,098 |